

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Setiap negara memiliki beberapa tujuan, salah satu tujuannya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat terlihat dari pendapatan nasional, karena pendapatan nasional dapat menunjukkan seberapa besar aktivitas perekonomian secara keseluruhan dari suatu negara. Pendapatan nasional sendiri memiliki konsep berupa ukuran yang sering dipakai sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, namun dalam ini pendapatan nasional tidak satu-satunya indikator yang digunakan sebagai rujukan dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada periode tertentu. Dalam pertumbuhan ekonomi ada perkembangan atau perubahan serta penggunaan waktu (Boediono, 1999).

Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi, pembangunan merupakan suatu proses perbaikan untuk mendorong serta memberdayakan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun daerahnya, sehingga nantinya pembangunan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah adalah kebijakan pemerintah pada daerah itu sendiri. Maka dari itu peran pemerintah sangat penting sebagai mobilisator pembangunan ekonomi. Mengidentifikasi secara tepat kebijakan pemerintah supaya pertumbuhan ekonomi dapat tercapai di suatu daerah. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi daerah maka dapat dilihat dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) daerah tersebut. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran:

وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ

غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ

تُوبُوا إِلَيْهِ ۗ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

“Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)". (Q.S Hud 11:61)

Ayat ini mengandung dua makna yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Pertama *al-wujub* atau kewajiban manusia untuk mengelola bumi untuk tujuan pembangunan. Kedua, ayat tersebut mengandung perintah Tuhan

kepada umat manusia untuk membangun jagad raya. Perintah Allah tersebut wajib dan mutlak dan kata *al-‘imarah* (memakmurkan) identik dengan kata *an-tanmiyah al-iqtisadiyah* (pembangunan ekonomi).

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bagian dari pembangunan ekonomi nasional. Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di Pulau Jawa dan provinsi ini memiliki 4 kabupaten dan 1 kota. Pada setiap daerah memiliki latar belakang wilayah serta karakteristik yang meliputi alam, sosial, ekonomi dan sumber daya alam yang berbeda, sehingga hal itu menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi pada setiap daerah berbeda.

**TABEL 1.1.**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010**  
**Menurut Provinsi Tahun 2016-2018 (Milyar Rupiah)**

<b>Provinsi</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
DKI Jakarta	1.539.916,88	1.635.366,58	1.736.195,62
Jawa Barat	1.275.619,24	1.343.864,43	1.419.689,12
Jawa Tengah	849.099,35	893.750,44	941.283,28
DI Yogyakarta	87.685,81	92.302,02	98.026,56
Jawa Timur	1.405.563,51	1.482.299,58	1.563.756,37
Banten	387.835,09	410.045,92	433.888,32

Sumber: *BPS (berbagai terbitan)*

Pada tabel 1.1. di atas menunjukkan bahwa PDRB berbeda pada setiap provinsi. Masing-masing provinsi memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga menghasilkan output yang berbeda. Dalam data yang disajikan pada tabel, terlihat bahwa PDRB masing-masing provinsi mengalami kenaikan.

Dapat dilihat Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki nilai PDRB paling rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Pulau Jawa.

Hal ini dapat terjadi karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut BPS (2019), pada tahun 2018 laju pertumbuhan PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta menempati urutan pertama tertinggi, serta kenaikan yang dialami pada tahun 2017 ke tahun 2018 merupakan kenaikan tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa. Kenaikan tersebut sebesar 0,94%, sedangkan pada posisi kedua dengan kenaikan laju PDRB hanya sebesar 0,29% pada Provinsi Jawa Barat.

Menurut teori Solow-Swan, ketersediaan faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Faktor produksi yang dimaksud adalah penduduk, tenaga kerja dan akumulasi modal. Pandangan teori ini didasarkan pada analisis ekonomi klasik yang menjelaskan bahwa perekonomian berada pada tingkat pengerjaan penuh (*full employment*) dan tingkat pemanfaatan penuh (*full utilization*) dari faktor-faktor produksinya, sehingga dengan kata lain, perekonomian akan terus berkembang sesuai dengan penambahan penduduk, akumulasi capital dan kemajuan teknologi (Arsyad, 2016).

Jika suatu daerah memiliki penambahan penduduk, maka hal ini tentu saja akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Dengan jumlah penduduk yang besar berarti ketersediaan tenaga kerja juga semakin

besar. Namun hal ini akan berdampak negatif jika besarnya ketersediaan tenaga kerja tidak diimbangi dengan kualitas penduduk serta lapangan pekerjaan, maka hal ini justru akan menjadi beban bagi perekonomian suatu daerah. Seharusnya dengan jumlah penduduk yang semakin banyak, maka bertambah pula barang dan jasa yang dapat dihasilkan.

**TABEL 1.2.**  
**Tenaga Kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2018**

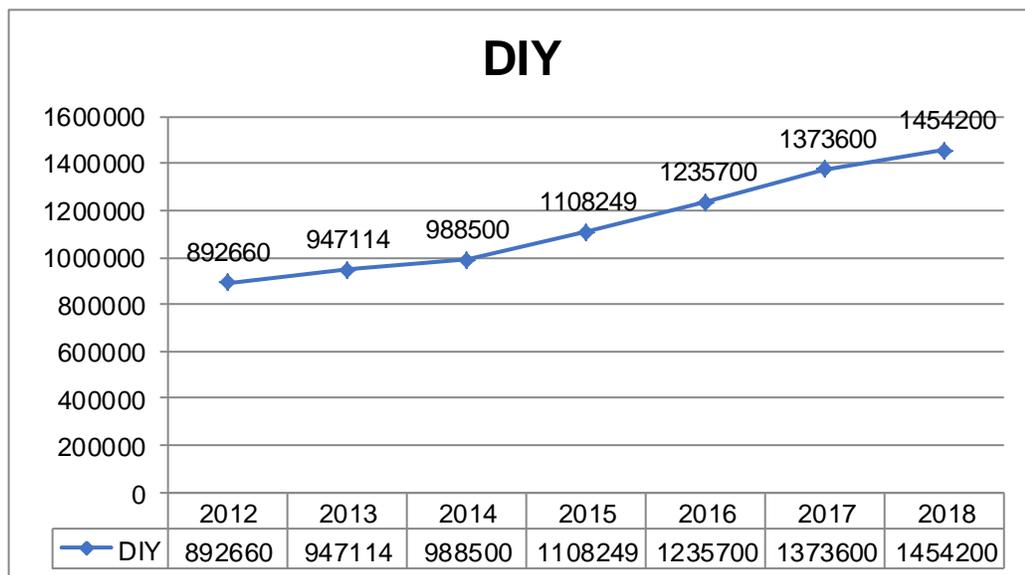
<b>Tahun</b>	<b>Bekerja (Jiwa)</b>
2012	1.867.708
2013	1.886.071
2014	1.956.043
2015	1.891.218
2016	2.042.040
2017	2.053.168
2018	2.118.392

Sumber: *BPS (berbagai terbitan)*

Menurut Rofii dan Ardyan (2017), Putri (2014), Novianto dan Atmanti (2013), tenaga kerja merupakan salah faktor produksi. Jumlah penduduk yang besar berarti tenaga kerja yang tersedia juga semakin besar. Dengan ketersediaan tenaga kerja yang melimpah maka ini yang akan berpengaruh terhadap tingkat output dalam perekonomian. Semakin banyak jumlah penduduk maka akan semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Melihat tabel 1.2. di atas, tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung mengalami kenaikan, meskipun pada tahun 2015 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian, pada tahun selanjutnya tenaga kerja terus mengalami peningkatan. Dengan adanya

kenaikan jumlah orang yang bekerja ini, diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tenaga kerja erat kaitannya dengan upah minimum. Tingkat upah minimum yang didapatkan dapat berpengaruh terhadap produktivitas pekerja. Rata-rata setiap tahunnya ada kenaikan upah minimum regional pada setiap daerah. Hal ini karena adanya tuntutan ekonomi yang terjadi pada suatu perekonomian. Setiap daerah mempunyai ketentuan peraturan jumlah upah minimum yang berbeda. Di bawah ini merupakan grafik upah minimum Daerah Istimewa Yogyakarta.



Sumber: *BPS Daerah Istimewa Yogyakarta*

**GAMBAR 1.1.**  
**Upah Minimum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2018**  
**(Rupiah)**

Terlihat pada gambar grafik di atas, nilai upah minimum provinsi selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Menurut Julianto dan Suparno (2016), dengan meningkatnya upah setiap tahun akan menyebabkan meningkatnya kesejahteraan penduduk dan meningkatnya kegiatan produksi, sehingga meningkatkan PDRB kabupaten/kota.

Disamping itu, untuk melakukan pembangunan ekonomi suatu daerah membutuhkan sejumlah dana yang diperoleh atau berasal dari berbagai sumber yang dikelola oleh daerah. Menurut Rahman dan Chamelia (2015), dana otonomi daerah pembangunan ekonomi suatu daerah dilakukan berdasarkan kemampuan pendapatan daerah karena hak atas pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah dan pembangunan ekonomi di daerah telah diserahkan secara otonom kepada Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota.

Salah satu potensi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sektor pariwisata. Hal ini tidak terlepas dari keadaan geografis provinsi ini yang memiliki daya tarik bagi wisatawan. Potensi pariwisata yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta berupa gunung, pantai, wisata sejarah dan potensi wisata lainnya bisa ditemukan. Perkembangan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sektor pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**TABEL 1.3.**  
**Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Daerah Istimewa Yogyakarta**  
**Tahun 2012-2018**

Tahun	PAD Sektor Pariwisata (Ribu Rupiah)	PAD DIY (Ribu Rupiah)	Kontribusi (%)
2012	153.156.101	947.586.340	16,16
2013	188.821.138	1.006.821.242	18,75
2014	236.932.548	1.722.311.670	13,75
2015	266.942.054	1.911.224.950	13,97
2016	353.823.536	2.048.662.390	17,28
2017	423.014.287	2.497.928.870	16,93
2018	475.224.670	2.462.767.660	19,30

Sumber: *Dinas Pariwisata dan BPS DIY (data diolah)*

Pendapatan asli daerah sektor pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode tahun 2012-2018 mengalami peningkatan. Ini menunjukkan bahwa potensi wisata daerah dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang baik, sehingga pemerintah perlu meningkatkan sarana dan prasarana yang ada pada lokasi wisata. Dengan tujuan membuat pengunjung merasa nyaman dan akan terus kembali lagi berwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Infrastruktur yang baik dapat menjadi penunjang di sektor pariwisata, seperti akses jalan yang baik, lampu penerangan yang baik serta fasilitas akomodasi yang memadai pengunjung. Hal-hal tersebut diharapkan bisa menjadikan referensi bagi pemerintah dan pihak pengelola lokasi wisata agar dapat meningkatkan minat kunjungan wisatawan, sehingga PAD sektor pariwisata dapat terus meningkat.

Untuk membiayai pembangunan daerah, salah satu modal yang digunakan bersumber dari PAD. Daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi

positif memiliki kemungkinan kenaikan PAD atau dengan kata lain adanya peningkatan PAD merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi atau PDRB.

Dari aspek jumlah industri, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki jumlah industri yang bervariasi setiap tahunnya. Menurut Julianto dan Suparno (2016), industri di Indonesia merupakan salah satu komponen perekonomian yang penting. Industri memungkinkan perekonomian berkembang. Berikut ini merupakan data jumlah industri yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**TABEL 1.4.**  
**Jumlah Industri di Daerah Istimewa Yogyakarta**  
**Tahun 2012-2018**

Tahun	Industri (Unit)
2012	65.081
2013	65.624
2014	65.770
2015	66.991
2016	65.360
2017	65.468
2018	66.273

Sumber: *BPS (berbagai terbitan)*

Jumlah industri mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga tahun 2015, namun di tahun 2016 jumlah industri mengalami penurunan sebesar 1.631 unit. Pesatnya pertumbuhan industri di pasar global maupun domestik berdampak pada meningkatnya persaingan diantara industri-industri tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisis PDRB Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan judul “Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Upah Minimum, Pendapatan Asli

**Daerah Sektor Pariwisata dan Jumlah Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2018)”**

**B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh variabel tenaga kerja terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2018?
2. Bagaimana pengaruh variabel UMK terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2018?
3. Bagaimana pengaruh variabel PAD sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2018?
4. Bagaimana pengaruh variabel jumlah industri terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2018?

**C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel tenaga kerja terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2018

2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2018
3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel PAD (Pendapatan Asli Daerah) sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2018
4. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel jumlah industri terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2018

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

##### 1. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan karena melalui penelitian ini penulis mendapatkan suatu kesempatan yang bermanfaat untuk mengembangkan ilmu yang didapatkan selama berada di bangku kuliah.

##### 2. Bagi Masyarakat

Diharapkan dari hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai saran kepada masyarakat, sehingga akan terciptanya peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan penghasilan masyarakat.

### 3. Bagi Pemerintah Daerah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan informasi kepada pemerintah terkait pengambilan kebijakan dalam upaya meningkatkan jumlah PDRB Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.